

## ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.18 TENTANG DANA Pensiun PADA PT POS INDONESIA KANTOR CABANG TACCIPI

Adhe Irawan<sup>1</sup>, Munawarah<sup>2</sup>, Rini Idayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone

[adheiraonee@gmail.com](mailto:adheiraonee@gmail.com), [munawarah@iain-bone.ac.id](mailto:munawarah@iain-bone.ac.id),

[Riniidayanti02@gmail.com](mailto:Riniidayanti02@gmail.com)

Received: 27-05- 2026

Revised: 10-06-2026

Approved: 19-06-2026

### ABSTRAK

*Pengelolaan dana pensiun di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Taccipi menjadi hal penting untuk menjamin hak dan kesejahteraan pegawai setelah memasuki masa pensiun. Selain itu, pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ketentuan PSAK 18 diperlukan agar laporan keuangan dana pensiun lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK No. 18 tentang akuntansi dan pelaporan dana pensiun serta mengkaji tingkat transparansi pengelolaan dana pensiun pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Taccipi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dibatasi pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Taccipi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK No. 18 tentang dana pensiun di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Taccipi masih terbatas. Hal ini disebabkan karena kantor cabang hanya berperan sebagai penyalur dana pensiun dari Taspen dan ASABRI, sehingga tidak melakukan pencatatan akuntansi secara penuh dan hanya menggunakan slip penarikan sebagai bukti transaksi. Meskipun demikian, transparansi pengelolaan dana pensiun telah berjalan dengan baik melalui penggunaan aplikasi ANDAL dan ASABRI serta sistem verifikasi wajah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kantor Cabang Taccipi hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan Taspen sehingga implementasi PSAK No. 18 tidak dapat diterapkan secara sepenuhnya.*

**Kata Kunci :** PSAK No. 18, Dana Pensiun, , Transparansi, PT Pos Indonesia, Good Governance

### PENDAHULUAN

Karyawan berperan penting dalam memberikan layanan terbaik kepada publik dan memastikan kesejahteraan mereka dengan bekerja sebaik mungkin. Para pekerja perlu memahami betapa pekerjaan mereka bergantung pada organisasi tempat mereka bekerja. (Abdullah, Nur Rachma, 2022) Penghasilan tampaknya bukan masalah selama mereka tetap terlibat. Namun, keberlangsungan kehidupan mereka dapat terganggu secara signifikan apabila para pekerja tersebut tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya akibat sakit maupun kecelakaan kerja. Seseorang perlu bersiap menghadapi kemungkinan bertambahnya usia atau kehilangan pekerjaan, baik tidak langsung maupun langsung secara langsung. Selain itu, hal ini dapat memengaruhi kemampuan karyawan untuk fokus bekerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas mereka (Yunus et al., 2023).

Program dana pensiun dalam pengelolaannya dianalisis yang dari sudut pandang ekonomi, dana tersebut berfungsi untuk mengelola praktik akuntansi dan

pelaporan dana pensiun bagi kelompok yang berkepentingan, sekaligus mendukung pengguna laporan keuangan, yang memberikan informasi kepada peserta pensiunan serta manajemen yang mengawasi dana pensiun perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan investasi dan operasional dana pensiun di dalam perusahaan telah dijalankan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, diperlukan manajemen profesional untuk memastikan dana atau kontribusi yang diterima digunakan dan diinvestasikan seefisien mungkin. Selain itu, mereka dapat dengan efisien mendapatkan keuntungan selaras dengan strategi investasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Moray et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, tanggung jawab dasar dana pensiun adalah mengelola dan menghasilkan dana untuk membangun program pensiun manfaat pasti (PMP) agar dapat menjaga keberlanjutan dan pendapatan bagi peserta di usia lanjut mereka (Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1992, n.d.)

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 adalah seperangkat standar akuntansi keuangan (SAK) yang secara khusus berlaku untuk dana pensiun sebagai panduan untuk proses akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan karena dana pensiun memiliki tujuan dan kegiatan bisnis yang berbeda dari perusahaan pada umumnya. Beberapa akademisi telah meneliti bagaimana Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait dengan klausul-klausul yang relevan (Mose & Elim, 2020).

Penelitian oleh Meidah, Rida dan Lia (2024) berjudul *"Analisis PSAK No. 18: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Terhadap Bank Indonesia"* menyatakan bahwa Sistem dana pensiun di Indonesia masih dalam tahap awal perkembangannya, meskipun program dana pensiun memberikan keuntungan yang substansial bagi bisnis. Sistem pensiun Indonesia masih berada di peringkat C, menempati peringkat ke-41 di dunia dengan skor indeks 51,8%, menurut studi tahunan Mercer CFA Institute Global Pension Index (2023). Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika hanya 49,2%, skor ini telah meningkat. Meskipun ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa bagi program dana pensiun Indonesia, pertumbuhan ini tetap dianggap kurang ideal karena, terlepas dari sistem yang ada saat ini, sistem tersebut masih memiliki kekurangan dan perlu diperbaiki (Fadjrihana et al., 2024).

Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada kesesuaian implementasi PSAK No.18 dan realita pencatatan yang terjadi dilapangan dan seberapa tingkat transparansi yang di jalankan dalam pengelolaan dana pensiun di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Taccipi. Pengelolaan dana pensiun di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Taccipi menjadi menarik untuk diteliti karena memiliki karakteristik dan permasalahan yang spesifik, terutama berkaitan dengan pemahaman pegawai terhadap mekanisme dana pensiun, proses administrasi, serta implementasi PSAK 18 dalam praktik pengelolaan di tingkat cabang. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pensiun juga menjadi perhatian

penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kesejahteraan pegawai setelah memasuki masa purna tugas. Kondisi tersebut menjadikan Kantor Cabang Taccipi layak dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana pensiun telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan praktis bagi manajemen PT Pos Indonesia serta pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mengungkap praktik terbaik maupun tantangan unik yang muncul dari karakteristik operasional Kantor Cabang Taccipi, yang membedakannya dari cabang lain atau studi di tingkat korporat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan suatu tabungan yang dipeurntukkan untuk pembayaran manfaat pensiun. Tabungan yang berasal dari pekerja dan perusahaan pemberi pekerja dikelola oleh suatu lembaga perantara, walaupun beberapa perusahaan atau lembaga besar mengelola dana pensiunnya sendiri secara *in house*. Manfaat pensiun diberikan kepada pekerja yang sudah pensiun. Persyaratan penerima manfaat pensiun berbeda-beda antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Ada yang mempersyaratkan pekerja yang meninggalkan perusahaan sebelum umur pensiun tidak berhak menerima pensiun, ada yang mempersyaratkan penerima manfaat pensiun adalah pekerja yang bekerja sekrang-kurangnya 5 atau 10 tahun atau lebih dan memperoleh manfaat secara prorata terkait dengan lamanya di pekerja aktif bekerja (Tarmiden Sitorus, Pasar Obligasi Indonesia : Teori Dan Praktik, 2021, h. 173).

### Jenis Dana Pensiun

#### a. Program Pensiun Iuran Pasti (*Benefit Contribution Pension Plan*)

Dalam program pensiun iuran pasti, kontribusi ke dana dan keuntungan investasi di masa depan digunakan untuk menghitung jumlah manfaat pensiun. Manfaat karyawan ditetapkan dengan menambahkan imbal hasil pengembangan atau investasi ke jumlah total kontribusi yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Laporan tentang rencana iuran pasti dimaksudkan untuk memberikan pembaruan berkala tentang bagaimana rencana pensiun tersebut diimplementasikan dan seberapa baik kinerja investasinya”.

#### b. Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit Plan*)

Dalam program pensiun manfaat pasti, jumlah yang diterima sebagai tunjangan pensiun dihitung menggunakan rumus yang biasanya didasarkan pada masa kerja dan/atau penghasilan karyawan. Untuk mengevaluasi hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu ke waktu, pelaporan program tunjangan pensiun berfungsi untuk memberikan informasi berkala tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program tunjangan pensiun (Nu'man, 2023).

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 (PSAK No. 18)**

PSAK adalah seperangkat pedoman untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Tujuan PSAK adalah membuat laporan keuangan yang dapat disajikan secara konsisten. Hal ini memungkinkan perbandingan catatan keuangan dari masa lalu dengan catatan keuangan saat ini. Pernyataan Akuntansi Dana Pensiun dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18. Pernyataan ini digunakan ketika menyusun laporan keuangan skema manfaat pensiun. Dana pensiun, anuitas, rencana pensiun, dan program pensiun adalah beberapa nama yang digunakan untuk merujuk pada skema manfaat pensiun. Dalam pernyataan ini, dana manfaat pensiun dianggap sebagai entitas pelaporan yang berbeda dari pemberi kerja, meskipun pemberi kerja merupakan peserta dana pensiun. Pelaporan, penilaian, dan pengungkapan laporan keuangan untuk dana manfaat pensiun diatur oleh pernyataan ini (Anggun Dwi Lestari et al., 2025).

### **Transparansi**

Konsep keterbukaan dan transparansi memungkinkan masyarakat umum untuk mempelajari dan mengakses informasi terlengkap mengenai keuangan lokal. Transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk detail tentang bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan hasil yang dicapai (Rizal Maulana Khabiib, 2022).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan gagasan bahwa publik berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap hukum. Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat diakses publik, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan proses kebijakan, yang mudah tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga mengacu pada seberapa terbuka suatu lembaga menginformasikan para pemangku kepentingan tentang inisiatif pengelolaan sumber daya publiknya. Informasi yang bebas adalah landasan transparansi. Pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki akses ke semua lembaga, prosedur, dan informasi pemerintah, dan informasi tersebut harus cukup untuk pemantauan dan pemahaman.

Menurut Krina (2003: 17) dalam Angelina (2021), indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang tepat.
- b. Akseibilitas informasi.
- c. Menyediakan prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran aturan atau permintaan suap.

- d. Memaksimalkan peredaran informasi melalui kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan media (Angelina Trimurti rambu Ana, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif, yang berupaya untuk secara akurat, faktual, dan metodis menggambarkan fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan lebih berfokus pada bentuk kata-kata, narasi, atau gambar daripada angka-angka. Hal ini bertujuan untuk menangkap makna, pengalaman, dan pemahaman mendalam dari subjek penelitian. mendalam, dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan di kantor Pos Cabang Taccipi.

Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara kepada Kepala Kantor Pos Cabang Taccipi serta data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Data yang diperoleh kemudian terlebih dahulu ditelaah secara menyeluruh. Peneliti kemudian merangkum dan memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu terkait implementasi PSAK No. 18 (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) serta tingkat transparansi pengelolaan dana pensiun. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis tetap terarah. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan tema dan pola tertentu untuk mempermudah pemahaman serta penarikan kesimpulan.

Selanjutnya Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK No. 18. Dalam tahap ini, praktik yang terjadi di lapangan dibandingkan dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku, sehingga terlihat tingkat kesesuaian maupun keterbatasan implementasinya di Kantor Cabang Taccipi. Kesimpulan kemudian ditarik melalui proses verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi antara data empiris dan landasan teori, sehingga jawaban yang dihasilkan benar-benar menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi PSAK No. 18 tentang dana pensiun di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Taccipi masih terbatas karena kantor cabang hanya berperan sebagai penyalur dana pensiun dari Taspen dan ASABRI, sehingga tidak melakukan pencatatan akuntansi secara penuh dan hanya menggunakan slip penarikan sebagai bukti transaksi, namun transparansi pengelolaan dana pensiun sudah berjalan baik melalui penggunaan aplikasi ANDAL dan ASABRI serta sistem verifikasi wajah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi PSAK No. 18 Tentang Dana Pensiun Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Taccipi**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 sebagai pedoman akuntansi untuk mengendalikan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian dana pensiun. Standar ini dirancang untuk memastikan transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan entitas yang mengelola dana pensiun, baik dalam konteks program pensiun tangguhan (*defined benefit*) maupun program pensiun iuran pasti (*defined contribution*). PSAK No. 18 menekankan pentingnya pencatatan yang sistematis terhadap aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang terkait dengan dana pensiun, termasuk pengungkapan risiko aktuarial dan investasi yang mempengaruhi solvabilitas jangka panjang (Wardani, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan terhadap praktik pengelolaan dana pensiun, implementasi PSAK No. 18 di Kantor Cabang Taccipi menunjukkan keterbatasan signifikan. Kantor ini, yang beroperasi sebagai unit regional dari Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan tangan administratif untuk penyaluran dana pensiun kepada peserta. Struktur operasionalnya tidak mencakup fungsi pengelolaan keuangan yang komprehensif, sehingga pencatatan transaksi keuangan terkait dana pensiun tidak terintegrasi ke dalam sistem akuntansi internal kantor tersebut. Secara spesifik, tidak ada entri pembayaran dana pensiun yang dicatat dalam buku besar atau sistem keuangan Kantor Cabang Taccipi. Sebaliknya, prosesnya terbatas pada penerimaan uang tunai secara langsung dari Taspen, yang kemudian disalurkan kepada penerima pensiun tanpa melalui mekanisme akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 18 (Adha, 2025).

Keterbatasan ini tercermin dalam praktik dokumentasi, di mana bukti penyaluran dana pensiun utamanya berupa slip penarikan tunai. Slip ini berfungsi sebagai dokumen sederhana yang mencatat jumlah dana yang diterima oleh peserta pensiun, namun tidak mencakup pengakuan aset atau kewajiban yang diperlukan oleh standar akuntansi. Dalam konteks PSAK No. 18, pengakuan aset dana pensiun melibatkan pencatatan investasi, kontribusi, dan hak peserta, sementara pengukuran memerlukan penilaian aktuarial untuk menentukan kewajiban pensiun masa depan. Pengungkapan yang memadai, seperti laporan risiko dan performa investasi, juga tidak dilakukan di tingkat kantor cabang ini, karena fungsinya murni operasional dan bukan strategis (Wardani, 2023).

Namun, sebagai unit operasional dalam perusahaan pos yang terpusat, Kantor Cabang Taccipi tidak memiliki otoritas atau kapasitas untuk mengelola keuangan program pensiun secara independen. Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) menunjuk pengelolaan dana, investasi, dan akuntansi utama berada di level pusat. Dengan demikian, ketidakpenerapan PSAK 18 di tingkat cabang bukanlah pelanggaran melainkan konsekuensi logis dari struktur terpusat tersebut. PSAK 18 memang ditujukan bagi badan pengelola dana pensiun (Dana Pensiun) sebagai entitas tersendiri, kantor cabang yang hanya menjalankan tugas administratif bukanlah entitas hukum pengelola dana pensiun.

## Transparansi Pengelolaan Dana Pensiun PT Pos Indonesia ( Persero ) Kantor Cabang Taccipi

Dalam konteks pengelolaan dana pensiun, transparansi merupakan prinsip fundamental yang memastikan akuntabilitas, kepercayaan, dan efisiensi sistem keuangan. Berdasarkan praktik yang diterapkan di Kantor Cabang Taccipi, tingkat transparansi telah mencapai standar yang sangat baik, sebagaimana diukur melalui indikator aksesibilitas informasi dan partisipasi peserta. Narasi ini menganalisis praktik tersebut secara mendalam, dengan fokus pada aspek digitalisasi, keamanan transaksi, serta interaksi manusiawi, sambil mengintegrasikan perspektif ilmiah dari bidang governance korporasi dan teknologi informasi.

Pertama, akses penuh yang diberikan kepada peserta pensiun untuk memantau saldo dan transaksi melalui aplikasi digital menandai evolusi signifikan dalam model pengelolaan dana pensiun.(Adha, 2025) Aplikasi ANDAL, yang dikembangkan khusus untuk Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), serta ASABRI, memfasilitasi pemantauan real-time terhadap saldo. Real-time monitoring ini didasarkan pada teknologi *cloud computing* dan database terintegrasi, yang memungkinkan sinkronisasi data instan tanpa penundaan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, fitur ini mengurangi asimetri informasi antara pengelola dana dan peserta, sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meminimalkan risiko moral *hazard* yaitu, potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal.

Selain itu, aspek keamanan transaksi ditingkatkan melalui mekanisme konfirmasi wajah, yang mengintegrasikan biometrik sebagai lapisan autentikasi tambahan (Adha, 2025). Fitur ini tidak hanya terbatas pada pengecekan saldo sederhana, tetapi juga diterapkan pada transaksi yang lebih kompleks, seperti penarikan atau transfer. Implementasi ini di Kantor Cabang Taccipi mencerminkan adopsi praktik terbaik dalam *cybersecurity*, yang selaras dengan regulasi seperti UU ITE di Indonesia, memastikan bahwa data peserta dilindungi dari ancaman eksternal seperti *hacking* atau *phishing*.

Di samping inovasi digital, transparansi juga diperkuat melalui interaksi langsung dengan pegawai kantor. Pegawai di Kantor Cabang Taccipi menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan informasi yang akurat dan detail kepada peserta, termasuk penyediaan slip penarikan yang komprehensif (Adha, 2025). Slip ini mencakup elemen-elemen seperti tanggal transaksi, jumlah nominal, biaya administrasi, dan referensi rekening, yang memungkinkan audit mandiri oleh peserta. Dari perspektif sosiologi organisasi, praktik ini membangun relasi kepercayaan (*trust-building*) antara stakeholder, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepuasan peserta.

Transparansi ini didukung oleh struktur PT Pos Indonesia yang menekankan akuntabilitas, meskipun ditingkat cabang terbatas pada penyaluran

## KESIMPULAN

1. Implementasi PSAK No. 18 tentang dana pensiun di PT Pos Indonesia ( Persero ) Kantor Cabang Taccipi sangat terbatas karena kantor ini hanya berperan sebagai peyalur dana pensiun dari Taspen dan ASABRI. Pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian tidak sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK No. 18, karena tidak ada pencatatan keuangan penuh, hanya ada slip penarikan sebagai bukti sederhana. Dan ketidakpenerapan PSAK 18 di tingkat cabang bukanlah pelanggaran melainkan konsekuensi logis dari struktur terpusat tersebut.
2. Transparansi pengelolaan dana pensiun, disisi lain, sudah sangat baik, dengan akses melalui aplikasi ANDAL dan ASABRI serta keamanan konfirmasi wajah, yang mendukung prinsip *good governance*. Secara umum, PT Pos Indonesia didirikan sejak era kolonial dan berkembang menjadi perusahaan logistik terintegrasi, dengan struktur organisasi yang mendukung operasi regional seperti Kantor Cabang Taccipi. Namun, peran Kantor Cabang Taccipi sebagai perpanjangan tangan Taspen karena dikantor cabang tidak mengelola dana pensiun pos sendiri karena adanya *rolling* pegawai yang dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga tidak menimbulkan adanya dana pensiun yang dikelola, sehingga membatasi implementasi standar akuntansi, meskipun transparansi tinggi

### Sara

1. Untuk meningkatkan implementasi PSAK No. 18 PT Pos Indonesia sebaiknya mengintegrasikan sistem pencatatan sederhana di kantor cabang, seperti digitalisasi slip penarikan ke dalam database terpusat
2. Tingkatkan transparansi dengan menyediakan laporan bulanan kepada peserta, meskipun bukan laporan keuangan lengkap.
3. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak transparansi terhadap kepuasan peserta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nur Rachma, A. M. (2022). Kinerja, Pengaruh Terhadap, Keuangan Saham, Harga Pertambangan, Perusahaan Terdaftar, Yang Indonesia, Bursa Efek. *Nobel Management Review*, 3(3), 580–594.
- Adha, Z. F. (2025). Kepala Kantor Pos Cabang Taccipi. *Wawancara, Tanggal*(17 Desember 2025).
- Angelina Trimurti Rambu Ana, L. L. G. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes ( Studi Kasus Bumdes Ina Huk ). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72.
- Anggun Dwi Lestari, Selvia Dwi Oktaviany, & Zahra Salsabila. (2025). Akuntansi Dana Pensiun Berdasarkan Psak 18. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 818–831.  
<https://doi.org/10.70248/Jakpt.V2i3.1594>
- Fadjrihana, M., Apriliani, R., & Uzilawati, L. (2024). Analisis Psak No. 18: Akuntansi

- Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Terhadap Bank Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3322–3334.  
<https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i6.2276>
- Moray, T., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya Pada Pt Bank Sulutgo. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 253–262.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37509>
- Mose, C. I., & Elim, I. (2020). Analisa Pencatatan Pemoangan Iuran Dana Pensiun Pt. Pos Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 80–89. <https://doi.org/10.32400/Gc.11.2.13064.2016>
- Nu'man, M. (2023). Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia. *Aleph*, 87(1,2), 149–200.  
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isallowed=y>  
<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/Loeblein%2c%20Lucineia%20Carla.pdf?sequence=1&isallowed=y>  
<https://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
- Rizal Maulana Khabiib, H. P. (2022). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 53(9), 1381–1393.
- Sitorus, T. (2021). *Pasar Obligasi Indonesia: Teori Dan Praktik*.  
[https://books.google.co.id/books?id=Y0nfeaaaqbaj&pg=pa173&dq=Manfaat+Dana+Pensiun&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=x&ved=2ahukewiwqz26rdkoaxw5zzgghfwai2q4hhdoaxoecauqaw#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Y0nfeaaaqbaj&pg=pa173&dq=Manfaat+Dana+Pensiun&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=x&ved=2ahukewiwqz26rdkoaxw5zzgghfwai2q4hhdoaxoecauqaw#v=onepage&q&f=false)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1992.
- Wardani, K. K. (2023). Analysis Of The Implementation Of Psak No . 18 Pension Fund Accounting Reporting At Bpjs Ketenagakerjaan Meulaboh Branch. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(18), 377–384.
- Yunus, A., Fitri, & Rachma, N. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No 18 Akuntansi Dana Pensiun Pada Pt. Bank Btpn Makassar. *Malomo: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 181–191.